

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa meliputi berbagai macam aspek penting didalamnya, salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya alam maupun manusia merupakan aset yang harus dikelola demi keberlangsungan pembangunan, namun sumber daya alam tidak dapat dikelola sendiri tanpa adanya bantuan sumber daya manusia. Pada era globalisasi dan modernisasi saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat khususnya di Negara Indonesia, sehingga masyarakat dituntut menjadi manusia yang berkualitas dengan segala kemampuan dan kompetensi yang dimiliki (Shinta Devi & Ertien Rining, 2021 : 804) . Hal tersebut sejalan dengan salah satu acuan pembangunan Indonesia Emas 2045 yang diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu manusia menjadi aspek penting dalam pembangunan, karena manusia tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga subyek pembangunan atau pelaku pembangunan.

Kualitas pembangunan suatu Negara bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas SDM maka akan semakin besar pula kemungkinan keberhasilan pencapaian tujuan. SDM dapat dianggap sebagai penopang pembangunan suatu Negara jika jumlah dan mutunya memadai, terutama pembangunan ekonomi. Menurut Robert Solow (Zulpahli

Dalimunthe & Diah Anggreani Hasri, 2019 : 23) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu “stok modal, perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja”. Pembangunan memerlukan SDM, dan SDM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga Negara perlu ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Tabel 1. Data Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di Kota Malang

Jenis Kelamin	Tahun (Jiwa)			Total	Presentase
	2020	2021	2022		
Laki-Laki	419.901	420.383	420.897	1.261.181	49,75%
Perempuan	423.909	424.550	425.229	1.273.688	50,25%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Tahun 2020-2022)

Berdasarkan data di atas, penduduk Kota Malang lebih banyak terdiri dari perempuan dibandingkan dengan laki-lakinya dengan presentase 50,25% atau lebih dari setengah penduduk Kota Malang. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Indonesia sebagai Negara yang masih perlu menangani permasalahan kesetaraan gender, didukung dengan adanya data dalam Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *Gender Inequality Indeks (GII)* atau ketimpangan gender Indonesia masih terbilang tinggi di ASEAN. Kesenjangan tersebut terjadi karena asumsi bahwa kontribusi perempuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain

itu, perempuan juga sering ditempatkan pada posisi atau jabatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 2. Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Malang

Wilayah	Tahun			Total
	2020	2021	2022	
Kota Malang	2.669	2.638	2.799	8.106
Presentase	32,93%	32,54%	34,53%	

Sumber: Badan Pusat Statistik (Tahun 2020-2022)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dalam suatu Negara, karena penyandang disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak terpenuhi hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang mencapai 8.106 jiwa hingga tahun 2022. Dari jumlah tersebut, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya, padahal hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Selain itu UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai manusia yang harus mempertahankan kehidupannya, penyandang disabilitas perlu bekerja dan menghasilkan sesuatu, dimana hal itu membutuhkan keterampilan dan jaringan. Dan salah satu cara mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas adalah dengan melakukan pemberdayaan. Untuk

mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan disabilitas adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang memiliki cabang di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Malang. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh wakil ketua HWDI Kota Malang, Ibu Siska Budianti yang telah diwawancarai sebelumnya (3 November 2023), bahwa untuk meningkatkan kemandirian perempuan penyandang disabilitas atau anggotanya maka HWDI Malang menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti;

“Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan anggotanya dan menjembatani kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Malang. Selain itu, HWDI juga melakukan advokasi untuk kepentingan disabilitas dan melakukan kerjasama atau pengembangan jaringan dengan pemerintah, instansi swasta, LSM, media masa, maupun anggota HWDI dan teman-teman disabilitas lainnya”.

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, HWDI masih mengalami beberapa kendala, baik dari sisi pemerintah, organisasi HWDI, maupun anggota HWDI itu sendiri. Hal tersebut di ungkapkan oleh Ibu Siswinarsi sebagai pembina HWDI Kota Malang yang telah diwawancarai sebelumnya (13 November 2023), bahwa kendala-kendala tersebut meliputi;

“Sulitnya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dan apabila mengajukan proposal akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara HWDI sebagai penyelenggara hanya memanfaatkan kas organisasi untuk biaya operasional kegiatan yang juga tidak mencukupi, sehingga harus mencari sponsor untuk melakukan kerjasama. Selain itu dari sisi anggota, HWDI mengalami kendala dikarenakan kurangnya SDM yang

mumpuni dalam pembuatan proposal maupun kegiatan administrasi lainnya.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Upaya Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas pada organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas pada organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas pada organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang

2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas pada organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan atau keilmuan khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang kajian yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama untuk mewujudkan kesetaraan disabilitas dan kesetaraan gender serta meningkatkan semangat bagi para penyandang disabilitas dalam mewujudkan impiannya.